

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara di seluruh dunia telah melakukan berbagai cara untuk mengentaskan kemiskinan. Di Indonesia sendiri, kemiskinan adalah suatu masalah yang sulit dikendalikan dan kompleks. Melihat jaman dulu Indonesia sudah merasakan kemiskinan karena dikuasai oleh belunggu penjajah. Hal tersebut menyebabkan penduduk Indonesia masuk kedalam jurang kemiskinan. Sementara itu jika melihat potensi dari sumber daya alam, baik dari laut, udara atau laut. Kekayaan Indonesia tentu saja dapat meenyejahterakan penduduknya (Hissa et al., 2019).

Pemerintah telah melakukan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan dan sudah menjadi prioritas utamanya. Hal tersebut tertera dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang diantaranya yaitu monitoring dan evaluasi, perencanaan dan keterpaduan program, penetapan sasaran, serta efektifitas anggaran. Pemberdayaan perempuan ternyata juga memainkan peran penting dalam perekonomian. Seperti pada jaman sekrang perempuan sudah berpartisipasi aktif dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Seperti bekerja dan munculnya pengusaha perempuan di pedesaan. Dari perspektif gender, kasus ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi dan kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam meningkatkan ekonomi.

Namun mengenai peningkatan ekonomi perempuan khususnya di pedesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, seperti tingkat pendidikan, keterampilan yang rendah, kesempatan kerja yang sedikit dan juga hambatan ideologis yang terkait rumah tangga. Selanjutnya, perempuan juga menghadapi serangkaian kendala yang sering disebut sebagai “*triple burden of women*”, yaitu mereka harus secara bersamaan menjalankan fungsi reproduksi, produksi, dan fungsi sosial secara bersamaan dalam masyarakat.

Menyadari pentingnya potensi perempuan, maka Pemerintah Daerah Yogyakarta telah mengantarkan perempuan memasuki pasar kerja ekonomi produktif. Dalam kaitannya dengan upaya untuk mengkaji kontribusi atau peran perempuan, sebagaimana dikemukakan oleh Ihromi (2000: 10) perempuan memiliki tiga peran, yaitu:

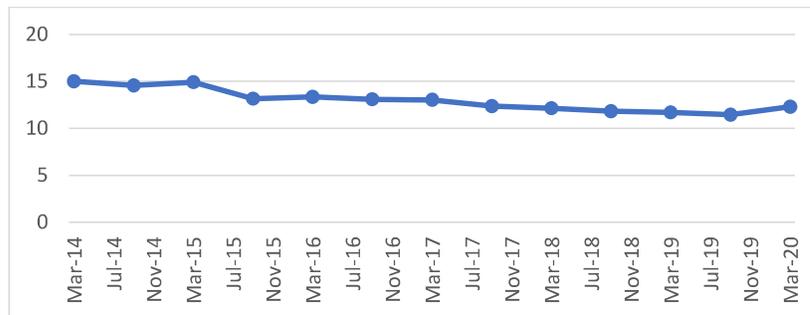
“Pertama peran produktif menyangkut kegiatan yang langsung menyumbang pendapatan keluarga. Tanpa melihat apakah kegiatan tersebut dibayar atau tidak dibayar, misalnya petani dan peternak. Yang kedua peran produktif menyangkut kelangsungan hidup manusia dan keluarga, misalnya melahirkan, menyusui, memelihara dan mengasuh anak, mengambil air, memasak, membersihkan rumah, dan menjahit. Serta yang peran sosial, mencakup kegiatan yang tidak terbatas pada pengaturan keluarga tetapi juga pada komunitasnya, misalnya peran dalam koperasi, kelompok tani dan sebagainya.”

Oleh karena itu, sesuai amanat UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Dan pemberdayaan masyarakat mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk memampukan mereka melihat permasalahan secara lebih luas dan jernih, untuk kemudian berpikir, mengambil keputusan, bernegosiasi dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk kesejahteraan mereka. Menurut Fahrudin (2012), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan melalui enabling, empowering dan protecting.

Dilansir dari berita online harian jogja bahwa salah satu wadah pemberdayaan perempuan di masyarakat desa adalah Desa Prima yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas serta taraf hidup perempuan. Desa Prima diisi dengan berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dilatarbelakangi tingginya tingkat kemiskinan di

DIY. Berdasarkan sensus penduduk 2020, angka kemiskinan di daerah ini mencapai 12,28 persen. Angka itu lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni 9,41 persen. Berikut adalah table yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta:



Gambar 1.1 Presentase Penduduk Miskin Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Maret 2014 - Maret 2020

Sumber: BPS Provinsi DIY Maret 2014-2020

Hal tersebut menjadi tantangan Pemda DIY untuk segera mengatasinya. Sebab jika terus dibiarkan kemiskinan bisa menjadi lingkaran setan. Salah satu desa prima berada di Kelurahan Bangunkerto yang mempunyai potensi yang sangat baik dalam sektor perkebunan salak sehingga dapat dikembangkan produk produk yang berbahan utama salak. Hal tersebut sebagai bentuk pengembangan ekonomi produktif. Menurut data statistik jumlah penduduk di Desa Bangunkerto tahun 2018 sebesar 8.445 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 4.237 jiwa dan perempuan 4.208 jiwa dengan mata pencaharian rata-rata kepala keluarganya adalah sebagai petani sedangkan ibu rumah tangganya sebagai pengolah hasil pertanian menjadi sebuah produk kuliner. Kondisi ini merupakan suatu kemajuan, jika dulu idealisnya perempuan hanya dianggap sebagai orang yang hanya

dirumah mengurus anak namun saat ini perempuan bisa dianggap sebagai penggerak roda ekonomi.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desa Di Kapanewon Turi, 2018

Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Bangunkerto	4.237	4.208	8.445
Donokerto	4.424	4.554	8.968
Wonokerto	3.784	3.817	7.601
Girikerto	4.784	4.691	9.475
	17.229	17.260	34.489

Sumber: BPS Kab Sleman

Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat setidaknya dua sasaran dalam program ini. Pertama, teridentifikasinya karakteristik sumber daya manusia (SDM), kehidupan dan aktivitas ekonomi perempuan. Kedua, terbentuknya kelompok perempuan produktif sebagai wadah pemberdayaan, peningkatan kemandirian dan peningkatan kondisi sosial ekonomi kaum perempuan miskin.

Sejumlah kegiatan yang dijalankan dalam Desa Prima di antaranya pengembangan usaha, mulai dari peningkatan SDM dari sisi Pendidikan, Kesehatan, politik, sosial-budaya dan lingkungan, serta kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan mulai dari perencanaan kegiatan usaha hingga evaluasi pelaksanaan. Namun sejak dibentuk, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam rangka pembinaan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) seperti kurangnya komitmen pejabat terkait untuk terus memberdayakan perempuan melalui program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA), penurunan anggaran yang berakibat pada kurangnya frekuensi untuk memberikan

pelatihan dan juga motivasi perempuan untuk maju. Selain itu terdapat keluhan yang berasal dari kelompok sasaran yaitu kurang sesuainya materi pelatihan dibandingkan dengan kebutuhan terutama untuk usaha kecil yang mempunyai modal dan omset yang tidak terlalu besar.

Melihat beberapa temuan awal terkait pelaksanaan program Desa Prima, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Bangunkerto yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan. Dengan judul “Desa Prima Sebagai Bentuk Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Ekonomi Produktif (Studi Kasus Di Desa Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman)”. Adapun alasan pemilihan lokasi adalah karena baru dibentuk pada tahun 2020, peneliti ingin melihat seberapa jauh program desa prima dalam mendorong dan mengoptimalkan kemandirian perempuan di desa Bangunkerto. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan bagi penyelenggara desa prima pada tahun yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan desa prima sebagai bentuk pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif di Desa Bangunkerto, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman Pada Tahun 2020-2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi produktif melalui program desa prima tepatnya di Desa Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yaitu di dalam bidang pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat Desa Prima Bangunkerto.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan rekomendasi atau acuan bagi Pemerintah Daerah Yogyakarta untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sebagai bahan acuan untuk Pemerintah Desa di Desa Prima Bangunkerto agar dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi produktif dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Selain dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pengelola dalam upaya pemberdayaan

masayarakat dan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang ingin turut andil dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengambil topik masalah mengenai pemberdayaan perempuan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1.2
Tinjauan Pustaka

No	Judul	Nama Penulis	Isi
1	Fungsi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Di Desa Maasawah Kapanewon Cimerak Kabupaten Pangandaran.	Hena Herlina (2019)	<p>Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa fungsi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di desa telah dilakukan. PKK di harapkan dapat memberikan kesempatan pada perempuan desa untuk menyalurkan kemampuannya, namun masih ada beberapa indicator yang belum tercapai atau sesuai dengan pelaksanaannya seperti, krangnya sosialisasi, kurangnya kegiatan, dan kurangnya pemahaman mengenai IPTEK. Hal tersebut mengakibatkan belum optimalnya fungsi pkk dalam peningkatan pemberdayaan perempuan.</p> <p><i>(Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(2), 201-212.</i> https://jurnal.unigal.ac.id/index.ph</p>

			p/mo derat/article/view/2410)
2	Pengembangan Model Pemberdayaan Perempuan Desa Melalui Pendidikan Berbasis Komunitas	Sujarwo, Trisanti, dan Fitta Ummaya Santi (2017)	<p>Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penerapan model pemberdayaan perempuan desa wisata melalui pendidikan berbasis komunitas wirausaha jasa kuliner memberikan hasil. Hasilnya berupa menambah motivasi peserta, cara memelihara pelanggan, cara mengelola usaha yang produktif dan ketrampilan memasak.</p> <p>(<i>Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan</i>, 10(1), 75-85. https://journal.uny.ac.id/index.php/jpip/article/view/16798/9944)</p>
3	Pemberdayaan Perempuan Di Desa Padiratana Kcamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah	Judy Aries Mulik (2021)	<p>Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak terlaksana dengan baik dan belum dapat mengoptimalkan peran perempuan dalam berkontribusi mendorong peningkatan dan pengembangan ekonomi keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan melalui tahapan-tahapan pemberdayaan, tahap seleksi lokasi untuk memastikan rencana aksi program sesuai dengan habitat dan potensi desa, tahap sosialisasi untuk menyampaikan dan memberikan pemahaman program, dan tahap ini terjadi pembentukan kelompok serta komitmen pemerintah desa dan anggota kelompok untuk mendukung penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, pada tahap penguatan kapasitas kelompok belum memberikan dampak peningkatan pengetahuan dan ketrampilan anggota. Tahap pemandirian</p>

			<p>kelompok, sebagian besar anggota tidak berperan aktif dan menyisakan tiga orang anggota kelompok aktif pada akhir program.</p> <p>(<i>Jurnal Administrasi dan Demokrasi (Administration and Democracy Journal)</i>, 1(2), 65-74. http://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JAD/article/view/4408)</p>
4	Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi	Sumiati (2020)	<p>Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dalam pemberdayaan perempuan dalam peningkatan pendapatan keluarga di Desa Beran tergolong baik. Termasuk tingkat akses pemberdayaan perempuan dalam peningkatan pendapatan keluarga, tingkat koneksi pemberdayaan perempuan, dan tingkat pemerataan kekuasaan dalam pemberdayaan.</p> <p>(<i>JURNAL SOSIAL: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial</i>, 21(1), 19-23. http://sosial.unmermadiun.ac.id/index.Php/sosial/article/view/50)</p>
5	Pemberdayaan Perempuan Nelayan Dalam Pengembangan Usaha Nugget Kerang Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo	Tukiman et al (2018)	<p>Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu pelatihan, pendampingan dan praktik pembuatan nugget cangkang sesuai resep adonan yang bercita rasa dan higienis, praktik manajemen pemasaran pengemasan dan pelabelan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan kreatif dalam memproyeksikan</p>

			<p>masa depan mereka, keluarga nelayan di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pemerintah daerah dalam mengembangkan bisnis home industry di desa mereka. Selain itu, mereka akan mampu berdiri sendiri dengan potensi yang ada di daerahnya. Sistem pengelolaan yang berbasis kemandirian dan kreativitas dalam pengembangan produksi nugget tempurung masih jarang ditemukan.</p> <p><i>(Journal of Public Sector Innovations, 2(2), 51-55.</i> https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/3175)</p>
6	<p>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)</p>	<p>Priyo Utomo et al (2019)</p>	<p>Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Tahapan pengelolaan kegiatan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan salah satunya adalah melakukan sosialisai baik di desa maupun di antar dusun yang memiliki tujuan agar pelaku-pelaku di tingkat desa maupun di kecamatan memahami adanya program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan salah satunya adalah program simpan pinjam perempuan supaya dimanfaatkan serta melakukan proses lanjutan. Sasaran dari pemanfaat program simpan pinjam perempuan efektif karena semua kelompok yang berjenis kelamin perempuan serta pengembalian pinjaman adalah 12 bulan. Perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh pemanfaat program simpan pinjam perempuan yakni ibu-ibu atau</p>

			<p>wanita yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini memiliki pekerjaan pokok sebagai penjahit dan ada juga yang mulai berdagang dan kini mereka mampu untuk membiayai kehidupan sehari-hari.</p> <p>(<i>Jurnal Mitra Manajemen</i>, 3(4), 382-396. http://www.ejurnalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/229)</p>
7	Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	Hesti Kusuma Yuwi Citra et al (2017)	<p>Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Bentuk pemberdayaan perempuan meliputi pertanian, pengembangan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Bentuk pelaksanaan yaitu dengan konsep kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan - Kawasan rumah Pangan Lestari (P2KP-KRPL) dengan melibatkan kaum perempuan yang tergabung dalam satu kelompok agar kekuatan kelembagaan yang merupakan milik kaum perempuan dapat berjalan dengan baik. Peran ini akan menciptakan keuntungan ganda karena disatu sisi kaum perempuan dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan ikut membantu menambah pendapatan serta membangun pertanian didaerahnya. Kegiatan P2KP-KRPL juga ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan</p>

			<p>masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat yang aktif dan produktif. Kelompok sasaran optimalisasi lahan pekarangan adalah kelompok wanita tani yang berdomisili berdekatan dalam satu desa, dilakukan dengan metode sekolah lapang melalui pendampingan oleh penyuluh pendamping KRPL Desa.</p> <p><i>(Indonesian Journal of Government and Communication Studies, 1(1), 1-15.</i> http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS/article/view/91/62)</p>
8	Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Pembangunan Desa	Melkianus Suni et al (2020)	<p>Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan di desa Letmafo, perempuan mantan pekerja migran berpartisipasi dalam pembangunan melalui kegiatan pemberdayaan kelompok tenun 'Teon Tabua' dengan proses kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, kesediaan masyarakat untuk mendukung, dan kemampuan masyarakat untuk menghitung dalam program pemberdayaan yang dilakukan di desa, hasilnya untuk menunjang pendapatan rumah tangga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kesempatan, kemauan, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa telah dilakukan oleh perempuan yang ditentukan oleh mentalitasnya</p>

			<p>untuk membangun atau meningkatkan kehidupannya dengan interaksinya dalam kelompok pemberdayaan tenun 'Teon Tabua' tenun.</p> <p>(<i>Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora</i>, 3(2), 142-149. https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/KANGA/article/view/1606)</p>
9	Pemberdayaan Perempuan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Lunyuk	Laini Sintya (2021)	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemanfaatan pekarangan berkelanjutan (P2L) merupakan program yang perlu diprioritaskan dalam pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Lunyuk. Pemerintah di Kecamatan Lunyuk telah melakukan upaya dalam mengatasi banyaknya waktu luang yang terbuang khususnya kaum perempuan di desa dengan cara melibatkan kaum perempuan dalam proses pembangunan desa melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya perempuan di desa, sehingga memberikan manfaat bagi para perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, dengan adanya BUMDES diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi perempuan khususnya di Kecamatan Lunyuk.</p> <p>(<i>Nusantara Journal of Economics</i>, 3(01), 9-16. http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/nje/article/view/969)</p>

10	Model Literasi Berbasis Entrepreneurship dalam Peningkatan Ekonomi Produktif Perempuan Istri Nelayan Tradisional	Mintarsih Arbarini (2018)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sosial ekonomi dan pendidikan keluarga nelayan dalam kondisi kurang baik, masih dalam kondisi sosial ekonomi yang kurang baik. 3) Upaya yang dilakukan oleh istri nelayan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dengan mengandalkan pendapatan yang ada untuk kebutuhan sehari-hari. 3) Pendidikan literasi berbasis kewirausahaan didasarkan pada pemenuhan minat dan kebutuhan istri nelayan tradisional, termasuk kegiatan yang membantu mereka menerapkan kemampuan dan keterampilan baru yang diperoleh, dalam rangka meningkatkan kualitas dan taraf hidup mereka. Model literasi yang dikembangkan menekankan pada kebutuhan belajar terkait kecakapan hidup yang terdiri dari berbagai keterampilan vokasional dan juga menekankan pada pengembangan motivasi kerja, sikap modern, dan kecakapan hidup lainnya yang dapat membangkitkan jiwa wirausaha sehingga dapat meningkatkan ekonomi produktif.</p> <p><i>(Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, 2(2).</i> https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc/article/view/27505)</p>
11	Sistem Informasi Piutang pada Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD) Model Desa Prima Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten	Melda Zulika Lestari et al (2017)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD) mulai aktif dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahan sendiri serta</p>

	Mempawah		<p>pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. UPKD di Kecamatan Sungai Pnyuh Kabupaten Mempawah merupakan wujud pelaksanaan dari Model Desa Prima yang sudah berjalan selama 8 tahun dengan sumber dana berasal dari APBN dan dikelola oleh Desa. Dana yang ada dipinjamkan kepada masyarakat Desa khususnya untuk para Ibu Rumah Tangga yang memiliki Usaha kecil. UPKD ini masih menggunakan pengolahan data dengan sistem yang sederhana yaitu dengan menggunakan aplikasi pengolah angka dan lembaran kertas. Oleh karena itu proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan kerap kali memakan waktu dan terjadi kekeliruan. Untuk itu dibangunlah suatu sistem informasi piutang dengan menggunakan model pengembangan waterfall, sehingga dapat dihasilkan suatu sistem yang mampu mempermudah pengolahan data serta dengan keamanan data yang lebih baik.</p> <p><i>(Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika (JEPIN) Vol, 3(2), 142-151</i> https://core.ac.uk/download/pdf/294888936.pdf)</p>
12	Evaluasi Dampak Program Desa PRIMA Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta	Murti Maharini (2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kaum perempuan dalam menopang perekonomian semakin berkembang yang mampu bergerak di bidang profesi maupun dunia usaha yang bertujuan untuk menggerakkan

		<p>perekonomian keluarga. Program Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Program Desa PRIMA terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus untuk mengetahui besarnya perubahan ekonomi rumah tangga sebagai dampak dari program Desa PRIMA terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan alat analisis Difference in Difference dengan membandingkan kelompok yang dikenai intervensi dengan kelompok yang tidak dikenai intervensi pada periode sebelum dan sesudah adanya kebijakan.</p> <p>(Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada http://etd.repository.ugm.ac.id/pelitia n/detail/166135)</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan public menurut Thomas R. Dye dalam Winarno (2005 :15) dalam bukunya “understanding public policy” mengemukakan bahwa kebijakan public adalah” a whatever government choose to do or no to do” artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

R. Dye mengatakan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan yang objektif dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadii bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai dampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan publik dalam hal ini bukan semata-mata merupakan pernyataan atau keinginan pemerintah ataupun pejabat pemerintah saja tetapi harus mengandung manfaat besar bagi warganya dan sebaiknya kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, sehingga disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Parsons dalam Tahir (2014: 24) memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan publik. Menurutnya kata policy mengandung makna kebijakan sebagai rationale, sebuah manifestasi dari penelitian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Sementara itu Nugroho (2009: 55) mengatakan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah,

sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat yang transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Abidin (2012: 19) mengemukakan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.

Menurut Edi Suharto (2010: 7) Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dari pendapat Edi Suharto mengindikasikan bahwa kebijakan merupakan pedoman yang digunakan dalam pengambilan suatu keputusan dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya definisi kebijakan menurut Titmus yang dikutip oleh Edi Suharto (2010:7) mengatakan bahwa kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmus senantiasa berorientasi kepada masalah-masalah dan berorientasi kepada tindakan yang dibuat secara terencana dalam mencapai tujuan tertentu.

Kemudian Islamy (2000: 22) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kebijaksanaan negara tersebut diatas mempunyai implikasi sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk Peraturan Daerah nyata berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.
3. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Tajchan (2006: 19) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu: perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, serta pengawasan dan penilaian hasil pelaksanaan kebijakan.

Jadi aktivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi dan evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

1.6.2 Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Suharsono (2008: 187) Implementasi

kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Winarno (2005:101), Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Afan Gaffar (2009:295), Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi kebijakan publik memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan mempengaruhi terhadap unsur-unsur yang terlibat didalamnya, baik aparatur maupun masyarakat. Adapun model-model implementasi kebijakan publik yang telah adalah secara teori adalah sebagai berikut.

Menurut Matland (Hamdi, 2014:98), literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (top-down) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (bottom-up). Kelompok

dengan pendekatan top-down melihat perancang kebijakan sebagai aktor sentral dalam implementasi kebijakan. Kelompok top-down juga memusatkan perhatiannya faktor-faktor yang dapat dimanipulasi pada tingkat sentral atau pada variabel yang bersifat makro. Kelompok bottom-up menekankan pada dua hal, yakni kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia layanan. Kelompok bottom-up berfokus pada variabel yang bersifat mikro. Kemudian muncul kelompok yang ketiga, yang mencoba menyasikan kedua kelompok tersebut dengan fokus pada aspek ambiguitas dan konflik dari implementasi kebijakan. Dalam perspektif kelompok yang ketiga adanya empat paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:

1. Konflik rendah-ambiguitas rendah (implementasi administratif).
2. Konflik tinggi-ambiguitas rendah (implementasi politis).
3. Konflik tinggi-ambiguitas tinggi (implementasi simbolik).
4. Konflik rendah-ambiguitas tinggi (implementasi eksperimental).

Menurut Hamdi (2014:99), model van Meter dan van Horn mencakup enam komponen sebagai berikut.

1. Suatu lingkungan yang secara berma-sama menstimulir pejabat pemerintah dan menerima produk dari pekerjaan mereka.
2. Tuntutan dan sumber daya yang membawa stimulan dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

3. Suatu proses konversi, termasuk struktur dan prosedur formal dari pemerintah, yang mentransformasikan tuntutan dan sumber daya menjadi kebijakan publik.
4. Kebijakan yang mewakili tujuan, intensi, atau pernyataan formal dari pejabat pemerintah.
5. Performa kebijakan sebagaimana ia senyatanya diberikan kepada klien.
6. Umpan balik dari kebijakan dan performa kepada lingkungan, yang ditransmisikan kembali kepada proses konversi sebagaimana tuntutan dan sumber daya pada masa berikutnya.

Model Van Meter dan Van Horn terdiri atas enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan performa seperti berikut:

1. Standar dan tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

2. Sumber daya kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa "*New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*".

3. Komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan

persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = Standard Operating Procedures) dan fragmentasi.

4. Karakteristik jawatan pelaksana. ‘

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

5. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan

persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat topdown yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

6. Disposisi pelaksana.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber

masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Hamdi (2014:103) menambahkan, sebagai suatu upaya ilmiah kritik yang ditujukan pada model top-down dan model bottom-down mendorong lahirnya model alternatif.

1. Model Sabatier

Sabatier berpandangan bahwa kebijakan perlu dianalisis dalam siklus lebih dari sepuluh tahunan. Kebijakan beroperasi dalam berbagai parameter yang kebanyakan dengan mudah diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan top-down. Berbagai parameter tersebut mencakup kondisi sosial ekonomi, instrumen hukum, dan struktur dasar pemerintahan.

2. Model Goggin

Menghadirkan suatu model komunikasi dari implementasi kebijakan antar pemerintahan yang melihat implementor pemerintah negara bagian (state) dari serangkaian saluran komunikasi.

3. Model Matland

Literatur implementasi menunjukkan bahwa top-downer dan bottom-upper memilih untuk melakukan studi mengenai tipe kebijakan yang berbeda. Top-downer cenderung memilih

kebijakan-kebijakan yang relatif jelas, sedangkan bottom-upper melakukan studi terhadap kebijakan dengan ketidakpastian yang lebih besar yang inheren dalam kebijakan. Matland mengembangkan suatu model kontingensim yang disebutnya sebagai model ambiguitas/konflik (ambiguity/conflich model).

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

Program Desa PRIMA sebagai implementasi dari Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan No.58/SK/MENEG.PP/XII/2004 Tentang Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Program Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri) merupakan kelompok binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi melalui kegiatan-kegiatan ekonomi produktif agar tercipta kehidupan yang sejahtera. Sasaran dari Program

Desa PRIMA adalah perempuan dari keluarga miskin agar terjadi penurunan tingkat kemiskinan di wilayah-wilayah yang dianggap berpotensi dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi (Buku Pedoman Desa PRIMA, 2019).

Dari beberapa definisi implementasi diatas, maka penulis mengartikan implementasi kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan, direncanakan, dibuat dan disahkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memperoleh hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.6.3 Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah

kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/ kekuatan/ kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/ kemampuan/ kekuatan, adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya. Senada dengan pengertian ini Prijono & Pranarka (1996: 77) menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah to give power or authority, pengertian kedua to give ability to or enable. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas